

## ASPEK FISKAL DAN FAKTOR SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA

Junaidin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bima Internasional MFH, Jl. Medika Farma Husada, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email: [junaidin251093@gmail.com](mailto:junaidin251093@gmail.com)

---

### Article History

Received: 22-01-2026

Revision: 05-02-2026

Accepted: 08-02-2026

Published: 10-02-2026

**Abstract.** Inclusive economic development is an important indicator for assessing the extent to which the development process is able to reach and provide benefits evenly to all levels of society and regions. This study aims to analyze the potential influence of education expenditure, health expenditure, average length of schooling, and adequate sanitation on inclusive economic development in Western and Eastern Indonesia during the period 2019–2023. This study uses a quantitative approach with a binary logistic regression method, which is applied to identify the opportunities of each independent variable in enhancing inclusive economic development. The results of the analysis show that health expenditure, average length of schooling, and adequate sanitation have a positive effect and provide significant opportunities for increasing inclusive economic development. Conversely, education expenditure has a negative effect and does not provide significant opportunities for inclusive economic development. These findings indicate that improving the quality of health, education through longer schooling, and access to proper sanitation play an important role in promoting more inclusive economic development, while the effectiveness of education expenditure needs to be further reviewed in order to have an optimal impact.

**Keywords:** Inclusive Economic Development, Opportunities, Binary Logistics

**Abstrak.** Pembangunan ekonomi inklusif merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana proses pembangunan mampu menjangkau dan memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pengaruh pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, rata-rata lama sekolah, dan sanitasi layak terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan Barat dan Timur Indonesia selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi logistik biner, yang diterapkan untuk mengidentifikasi peluang masing-masing variabel independen dalam meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan, rata-rata lama sekolah, dan sanitasi layak berpengaruh positif serta memberikan peluang yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi inklusif. Sebaliknya, pengeluaran pendidikan menunjukkan pengaruh negatif dan tidak memberikan peluang yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan melalui capaian lama sekolah, serta akses sanitasi yang layak berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, sementara efektivitas pengeluaran pendidikan perlu ditinjau lebih lanjut agar dapat berdampak optimal.

**Kata Kunci:** Pembangunan Ekonomi Inklusif, Peluang, Logistik Biner

---

**How to Cite:** Junaidin. (2026). Aspek Fiskal dan Faktor Sosial dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 1778-1788.  
<http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.5130>

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas serta merata bagi seluruh penduduk, mengurangi kesenjangan antar kelompok maupun wilayah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prasetya & Ilyas, 2023). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok elit atau korporasi besar (Anwar, 2022). Pendekatan pembangunan inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi manfaat yang adil sehingga peluang dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat (Sajid & Ali, 2018).

Meskipun konsep pembangunan ekonomi inklusif bukanlah hal baru, perhatian terhadap pendekatan ini terus meningkat seiring dengan masih tingginya ketimpangan sosial dan wilayah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat perekonomian suatu wilayah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kehidupan jangka panjang (Zahrah et al., 2024). Pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan dan kesempatan sebagai indikator kemajuan ekonomi yang lebih komprehensif (Harsono et al., 2024).

Di Indonesia, isu kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Pembangunan ekonomi inklusif diharapkan mampu menciptakan akses dan peluang yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Hartati, 2021). Namun, hingga saat ini, ketimpangan antara KBI dan KTI masih relatif tinggi dan belum sepenuhnya menjadi fokus dalam berbagai kajian pembangunan inklusif internasional, seperti yang dilakukan oleh *World Bank* dan *Asian Development Bank* (Larasati, 2023). Oleh karena itu, peningkatan pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional Indonesia (Rany et al., 2020).

Data dari BAPPENAS menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya merata dan belum dapat dikategorikan sebagai pembangunan yang inklusif. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya percepatan pembangunan ekonomi inklusif yang diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari perbaikan akses dan capaian pendidikan serta kesehatan. Pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan dan

layanan kesehatan berpotensi memperlebar kesenjangan dan memperkuat kemiskinan struktural (Kamran, 2023).

Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi inklusif harus mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencapai standar hidup yang layak serta mendorong perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif adalah kebijakan fiskal, khususnya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi maupun kondisi geografis (Hariyanto & Widayaiswara, 2018).

Akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitas diri, produktivitas, serta taraf hidupnya secara berkelanjutan (Purwanti & Rahmawati, 2021). Investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama dalam mendorong pembangunan Indonesia yang inklusif (Dartanto et al., 2020). Selain itu, pembangunan ekonomi inklusif juga menuntut pemerataan akses terhadap fasilitas dasar, seperti sanitasi layak, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (Bappenas, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aspek fiskal dan faktor sosial dalam pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan dan kesehatan, serta faktor sosial yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan akses terhadap sanitasi layak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi inklusif antarwilayah di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aspek fiskal dan faktor sosial terhadap Pembangunan ekonomi inklusif pada Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel dependen diproksikan dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Sedangkan, variabel independen diproksikan dengan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan,

Rata-rata Lama Sekolah, dan Akses Sanitasi Layak, Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel pada Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia dengan kurun waktu satu tahun yaitu 2019-2023.

**Tabel 1.** Klasifikasi Provinsi KBI dan KTI

<b>Kawasan Barat Indonesia</b>	<b>Kawasan Timur Indonesia</b>
Provinsi Aceh	Provinsi Bali
Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau	Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Jambi	Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Bengkulu	Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Bengkulu	Provinsi Gorontalo
Provinsi Lampung	Provinsi Sulawesi Barat
Kep. Bangka Belitung	Provinsi Maluku
Kep. Riau	Provinsi Maluku Utara
Provinsi DKI Jakarta	Provinsi Papua Barat
Provinsi Jawa Barat	Provinsi Papua
Provinsi Jawa Tengah	
Provinsi DI Yogyakarta	
Provinsi Jawa Timur	
Provinsi Banten	
Provinsi Kalimantan Barat	
Provinsi Kalimantan Tengah	
Provinsi Kalimantan Selatan	
Provinsi Kalimantan Timur	
Provinsi Kalimantan Utara	

Dalam Penelitian ini, sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder. Data adalah sekumpulan angka yang dikumpulkan untuk pengkajian statistik. Data sekunder merupakan data yang tersedia atau data tersebut dikumpulkan untuk keperluan penelitian lainnya (Abdul, dkk., 2022). Sumber data sekunder diambil dari website resmi pemerintah atau lembaga, dokumen langsung dan tidak langsung, Buku, Karya Tulis. Data sekunder disini mengambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappenas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang tepat akan membantu peneliti dalam mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pengumpulan data di penelitian ini berupa data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan, publikasi dari lembaga terkait, dan penelitian terdahulu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Regresi logistik merupakan regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang bertujuan untuk prediksi nilai peluang terjadi pada sebuah peristiwa (Roflin, 2023). Variabel regresi logistik dapat berupa kategorik ataupun numerik. Jika salah satu atau lebih adalah skala nominal bernilai lebih dari dua pada variabel independen maka harus membuat *dummy variable* yang merepresentasikan kategori dari variabel tersebut menggunakan *reference group* nya dari salah satu kategori tersebut. Penggunaan regresi logistik arena variabel dependen yang digunakan dua kategori atau bersifat dichotomous. Model logit dalam penelitian ini menggunakan fungsi logit dengan bantuan SPSS 27.

### **Analisis Deskriptif**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, yaitu gabungan antara data deret waktu (time series) dan data lintas wilayah (cross section) antar provinsi. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika perubahan data dari waktu ke waktu sekaligus membandingkan karakteristik antar wilayah. Data panel yang digunakan dapat berupa balanced panel apabila jumlah observasi pada setiap unit sama, atau unbalanced panel apabila jumlah observasi antar unit tidak sama. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik karena variabel dependen bersifat biner. Variabel terikat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu nilai 0 untuk daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang kurang inklusif (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif/IPEI 3–5) dan nilai 1 untuk daerah yang sudah tergolong inklusif (IPEI 6–8).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, pengujian dilakukan secara simultan dan parsial. Uji simultan digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki peluang yang signifikan dalam memengaruhi tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi dengan taraf kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 0,05$ ).

Selain itu, uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki peluang signifikan dalam memengaruhi tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi. Kriteria pengujian didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi masing-masing variabel dengan nilai alpha 0,05.

Terakhir, analisis juga dilengkapi dengan pengujian koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memberikan gambaran mengenai kemampuan model regresi dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, di mana nilai koefisien yang lebih besar menunjukkan kemampuan model yang semakin baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Variabel Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan (PPFP) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan (PPFP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia selama periode 2019–2023. Nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf *alpha* ( $p\ value = 0,623 > 0,05$ ) mengindikasikan bahwa hipotesis nol diterima, sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan belum secara langsung memberikan peluang terhadap tercapainya pembangunan ekonomi inklusif. Koefisien regresi yang bernilai negatif (-0,167) semakin menegaskan bahwa hubungan antara PPFP dan pembangunan ekonomi inklusif cenderung lemah dan tidak searah.

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif. Pengeluaran pendidikan yang tinggi dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses antarwilayah, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Dartanto et al. (2020) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan memiliki dampak jangka panjang dan tidak selalu langsung tercermin dalam indikator ekonomi inklusif dalam periode waktu yang pendek. Selain itu, Prasetya dan Ilyas (2023) juga menekankan bahwa pendidikan baru akan mendorong pembangunan inklusif apabila mampu meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial masyarakat secara nyata.

### **Variabel Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan (PPFK) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Berbeda dengan sektor pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan (PPFK) terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari *alpha* ( $p\ value = 0,014 < 0,05$ ) menunjukkan bahwa hipotesis

nol ditolak, sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan secara nyata meningkatkan peluang tercapainya pembangunan ekonomi inklusif. Koefisien regresi sebesar 0,918 dengan *odds ratio exp( $\beta$ )* sebesar 2,503 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat meningkatkan peluang pembangunan ekonomi inklusif sebesar 2,5 kali.

Temuan ini menegaskan pentingnya sektor kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan manusia. Kesehatan yang lebih baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan akibat beban biaya kesehatan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kamran (2023) dan Hariyanto dan Widayaiswara (2018) yang menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di negara berkembang.

### **Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari alpha (0,05) mengindikasikan bahwa hipotesis nol ditolak. Koefisien regresi sebesar 1,479 dengan *odds ratio exp( $\beta$ )* sebesar 4,389 menunjukkan bahwa peningkatan RLS memberikan peluang yang sangat besar terhadap tercapainya pembangunan ekonomi inklusif, yakni sekitar 4,38 kali lebih besar.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan masyarakat memiliki peran kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pekerjaan layak, pendapatan yang lebih stabil, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Purwanti dan Rahmawati (2021) serta Sajid dan Ali (2018) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam mengurangi ketimpangan dan memperluas kesempatan ekonomi.

### **Variabel Sanitasi Layak (SL) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Sanitasi Layak (SL) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) selama periode 2019–2023. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf *alpha* ( $p\text{ value} = 0,000 < 0,05$ ) mengindikasikan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga sanitasi layak berpeluang secara nyata dalam meningkatkan inklusivitas pembangunan ekonomi. Koefisien regresi sebesar 0,002 dengan nilai *odds ratio*

$\exp(\beta)$  sebesar 1,002 menunjukkan bahwa setiap peningkatan persentase akses sanitasi layak akan meningkatkan peluang suatu wilayah untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif, meskipun dengan besaran pengaruh yang relatif kecil.

Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa sanitasi layak merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi. Akses sanitasi yang memadai berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan masyarakat, menurunkan beban penyakit, serta meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan inklusif, sanitasi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kamran (2023) dan Bappenas (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas layanan dasar, termasuk sanitasi, berperan penting dalam memperluas peluang ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Namun demikian, nilai odds ratio yang mendekati satu menunjukkan bahwa meskipun pengaruh sanitasi layak signifikan secara statistik, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi inklusif masih bersifat marginal apabila berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa sanitasi perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih luas, yang harus diintegrasikan dengan faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kebijakan fiskal yang berpihak pada pemerataan. Temuan ini memperkuat argumen Zahrah et al. (2024) bahwa pembangunan inklusif memerlukan pendekatan multidimensional dan tidak dapat bergantung pada satu indikator tunggal.

### **Variabel Dummy Wilayah Kawasan Barat Indonesia (DWKBI) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Hasil pengujian terhadap variabel dummy wilayah Kawasan Barat Indonesia (DWKBI) menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Nilai signifikansi yang lebih besar dari *alpha* ( $p \text{ value} = 0,638 > 0,05$ ) mengindikasikan bahwa hipotesis nol diterima, sehingga perbedaan wilayah antara KBI dan KTI secara statistik tidak menentukan peluang pencapaian pembangunan ekonomi inklusif. Meskipun demikian, koefisien regresi yang bernilai positif (0,214) dan odds ratio sebesar 1,239 menunjukkan bahwa KBI secara kecenderungan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai IPEI dibandingkan KTI.

Tidak signifikannya variabel wilayah ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa kesenjangan pembangunan antara KBI dan KTI tidak semata-mata ditentukan oleh faktor geografis, melainkan lebih dipengaruhi oleh kualitas kebijakan dan distribusi akses terhadap layanan dasar. Temuan ini menguatkan pandangan Rany et al. (2020) dan Larasati (2023) yang menyatakan bahwa disparitas regional di Indonesia semakin dipengaruhi oleh perbedaan kualitas pembangunan manusia dan infrastruktur sosial, bukan hanya oleh letak wilayah barat atau timur.

Secara kritis, hasil ini juga mengisyaratkan adanya pergeseran pola pembangunan di Indonesia, di mana beberapa wilayah di KTI mulai menunjukkan peningkatan dalam indikator inklusivitas akibat intervensi kebijakan yang lebih terarah, seperti pembangunan sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif tidak lagi dapat dipahami secara dikotomis antara KBI dan KTI, tetapi harus dilihat berdasarkan capaian indikator pembangunan yang bersifat substantif. Hal ini sejalan dengan temuan Harsono et al. (2024) yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan inklusif lebih ditentukan oleh kualitas kebijakan sektor sosial dibandingkan klasifikasi wilayah semata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kebijakan fiskal yang diwakili oleh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan, serta faktor sosial yang diwakili oleh Rata-Rata Lama Sekolah dan Sanitasi Layak terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel dalam model, yaitu Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan, Rata-Rata Lama Sekolah, Sanitasi Layak, dan Dummy Wilayah Kawasan Barat Indonesia, memiliki peran dalam memengaruhi peluang tercapainya pembangunan ekonomi inklusif di kedua kawasan tersebut.

Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan, Rata-Rata Lama Sekolah, Sanitasi Layak, serta Dummy Wilayah Kawasan Barat Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan yang tercermin melalui lama sekolah, serta akses terhadap sanitasi layak merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Sebaliknya, Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPEI di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia selama

periode penelitian, yang mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

## REFERENSI

- Abdulkareem, H. K. K., Jimoh, S. O., & Shasi, O. M. (2022). Socioeconomic development and sustainable development in Nigeria: The roles of poverty reduction and social inclusion. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 3(3), 265–278. <https://doi.org/10.1108/JBSED-10-2021-0137>
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://inklusif.bappenas.go.id/data>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia*. BPS.
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2020). Intragenerational economic mobility in Indonesia: A transition from poverty to the middle class in 1993–2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 193–224. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1657795>
- Dartanto, T., Nurkholis, N., & Suryahadi, A. (2020). Education, health, and inclusive growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 321–345. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798725>
- Hariyanto, E., & Widyaishwara, L. (2018). Kebijakan fiskal dan pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2(1), 45–58.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1–12.
- Harsono, I., Sutanto, H., Rois, I., Fadliyanti, L., Saripta, B., & Mulawiani, W. (2024). Kontribusi infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 28(2), 196–208.
- Kamran, M., Rafique, M. Z., Nadeem, A. M., et al. (2023). Does inclusive growth contribute towards sustainable development? Evidence from selected developing countries. *Social Indicators Research*, 165, 409–429. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-03020-6>
- Larasati, D. (2023). Ketimpangan pembangunan wilayah Barat dan Timur Indonesia dalam perspektif ekonomi inklusif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(3), 233–247.
- Prasetya, F., & Ilyas, I. (2023). Pembangunan ekonomi inklusif dan tantangan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 155–169.
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(1), 32–34.
- Rany, A., Nugroho, S., & Widodo, T. (2020). Inclusive growth strategy and regional development in Indonesia. *Asian Development Policy Review*, 8(4), 299–315.
- Roflin, E., et al. (2023). *Regresi logistik biner dan multinomial*. Penerbit NEM.
- Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2023). Studi komparatif ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 3(1), 456–463.

- Sajid, A., & Ali, A. (2018). Inclusive growth and macroeconomic situations in South Asia: An empirical analysis. *Bulletin of Business and Economics*, 7(3), 97–109.
- Syafri, A. (2022). *Dampak belanja pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah* [Tesis/Disertasi tidak dipublikasikan].
- Zahrah, F., & Rahayu, S. (2024). Hambatan dan peluang pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan: Tinjauan literatur kritis. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan*, 3(1), 67–81.